

## BAB V

### TEMUAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Pengantar

Pilkada serentak Kota Bukittinggi pada tahun 2015 berhasil dimenangkan oleh pasangan Ramlan Nurmatias dan Irwandi yang berlatarkan jalur perseorangan atau dapat disebut juga dengan jalur independen. Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar hukum pengaturan calon independen. Konsekuensi nyata dari pencalonan independen yakni tidak memiliki kendaraan politik untuk mengakses pemilih, menanggung sendiri biaya politik, dan saat terpilih maka kepala daerah tersebut harus mampu mengatur keseimbangan kekuasaan dengan anggota legislatif (DPRD).<sup>1</sup>

Hadirnya keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai calon independen (perseorangan) dalam pemilihan kepala daerah merupakan suatu demokrasi yang menghadirkan kebebasan, partisipasi, maupun kompetisi, serta mencoba merombak model monopoli dalam penentuan calon pimpinan yang harus berasal dari partai politik. Sebagai sebuah organisasi, partai politik memiliki beberapa kelemahan yakni, lebih mengutamakan kepentingan partai diatas kepentingan nasional dan loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai melebihi loyalitas kepada negara.<sup>2</sup> Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tegas mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama

---

<sup>1</sup>Ni Putu Eka Martini. 2018. “ Problematika Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Hlm.1.

<sup>2</sup>Miriam Budiardjo.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.Hlm.408.

dalam pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan ajaran filsuf politik Amerika John Rawls yang menyatakan bahwa semua jabatan politik terbuka bagi setiap orang atas dasar persamaan hak.<sup>3</sup>

Kemenangan pasangan Ramlan Nurmatias dan Irwandi menjadi hal menarik karena dengan demikian pemerintahan berlangsung tanpa adanya peran partai politik dalam lingkup kepala daerah. Dengan demikian peran dari komunikasi politik antar kedua lembaga yakni eksekutif (kepala daerah) dengan legislatif (DPRD) merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemerintahan.

## **B. Bentuk Komunikasi Politik**

Ramlan Nurmatias menggunakan komunikasi politik sebagai penghubung antara kepala daerah dengan DPRD. Komunikasi utama yang dilaksanakan ialah melalui rapat resmi dengan anggota DPRD. Rapat ini sering dilaksanakan di kantor DPRD dan terkadang dilaksanakan pembahasan ringan diluar kantor. Salah satunya dengan menggunakan lobi politik, untuk memperlancar ikatan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kota Bukittinggi. Salah satu bentuk lobi politik yang dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat ialah, interaksi yang berlangsung pada saat acara Pacu Kuda yang diselenggarakan di Pacuan Kuda Bukit Ambacang Bukittinggi. Saat acara berlangsung Ramlan Nurmatias berinteraksi dengan anggota DPRD Bukittinggi, berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat unsur lobi yang terjadi pada

---

<sup>3</sup>Charles F. Andrian. 1992. *Kehidupan Politik Dan Pembahasan Sosial*. Tiara Wacana. Yogyakarta. Hlm.19

interaksi tersebut. Disamping lobi dengan anggota DPRD, acara “Pacu Kuda” tersebut juga dihadiri oleh beberapa kepala daerah di Sumatera Barat. Dapat diamati bahwa lobi yang dilakukan tidak hanya mencakup daerah Bukittinggi. Ini merupakan salah satu bentuk lobi politik yang dilakukan oleh Ramlan Nurmatias.<sup>4</sup> Hasil akhir yang diharapkan adalah kesamaan persepsi yang terwujud dalam perilaku nyata. Ini merupakan strategi yang dibuat dengan memperhatikan komunikasi sasaran.<sup>5</sup> Dalam menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang berlatar belakang independen, Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias tidak memiliki hambatan serius yang dapat mengakibatkan terhentinya proses pemerintahan Kota Bukittinggi.<sup>6</sup>

“Tidak ada gangguan. Buktinya kan Ana lihat sendiri pembangunan Bukittinggi berjalan lancar. Program-program dimasukkan ke DPRD, dari DPRD itu kan dibahas. Dipemerintah ada namanya TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kalau di DPRD itu ada Banggar namanya. Nanti TAPD dengan Banggar rapat itu apa program-program pemerintah nanti dibicarakan, dan nanti disetujui DPRD. Ternyata yang kita ajukan semua bisa jalan tidak ada masalah. Selama kebijakan serta program-programnya tidak melanggar undang-undang dan peraturan, tidak ada alasan bagi DPRD untuk tidak menyetujuinya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti melihat bahwa aktor utama, Ramlan Nurmatias tidak mengalami kendala dalam proses pemerintahan. Berjalan lancar dan latar independen tidak menjadi penghalang stabilitas pemerintahan. Sejauh

---

<sup>4</sup> Pengamatan Peneliti Secara Langsung Hadir Pada Acara Pacu Kuda, dimana peneliti duduk tepat disebelah Walikota Bukittinggi. Pacuan Kuda Bukit Ambacang, Bukittinggi 1 April 2018.

<sup>5</sup> Ratna Setyarahajoe.2016. “Bentuk Komunikasi Politik Untuk Membangun Perilaku Politik Masyarakat Lokal Guna Menciptakan Pemilukada Yang Aman”. Hlm 38-39.

<sup>6</sup>Wawancara dilakukan dengan Ramlan Nurmatias selaku Walikota Bukittinggi, yang bertempat di Kantor Balai Kota Bukittinggi, pada tanggal 25 Juni 2020, pada pukul 14.00WIB.

ini komunikasi politik yang dilakukan antara pemerintah dengan DPRD berjalan dengan lancar.

“Sampai sekarang Alhamdulillah tidak ada masalah karena ini juga sangat tergantung bagaimana kita membangun komunikasi yang kita lakukan dengan partai politik dan dengan dewan.”<sup>7</sup>

Keterangan dari Irwandi selaku Wakil Walikota Bukittinggi sejalan dengan Walikota Bukittinggi, yakni tidak memiliki kendala serta proses pemerintahan berjalan dengan lancar. “Tidak ada.”<sup>8</sup>

Yuen Karnova selaku Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi memberikan jawaban yang singkat dan padat saat peneliti mengajukan pertanyaan yang berbunyi, “Apakah latar belakang independen menghambat kepala daerah dalam proses pemerintahan?”. Sekretaris daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam administrasi pemerintah daerah.

“Proses pemerintahan yang kita dapatkan selama Ramlan Nurmatias menjadi walikota Bukittinggi yang maju melalui jalur independen. Kalau secara pemerintahan tentu berdasarkan hal-hal yang dijalani oleh pemerintah, walaupun beliau independen selagi menjalankan aturan dan peraturan tentu kita mendukung. Tapi kalau hal-hal yang sepanjang fungsi kita sebagai pengawasan, hal-hal yang tidak bertemu, permasalahan lapangan, administrasi, tentu kita akan mengoreksi kinerja dari pada walikota itu sendiri maupun SKPD nya sampai kebawah.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Wawancara dilakukan dengan Irwandi selaku Wakil Walikota Bukittinggi, yang bertempat di Kantor Balai Kota Bukittinggi, pada tanggal 25 Juni 2020, pada pukul 15.00WIB.

<sup>8</sup>Wawancara dilakukan dengan Yuen Karnova selaku Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, yang bertempat di Kantor Balai Kota Bukittinggi, pada tanggal 26 Juni 2020, pada pukul 10.00WIB.

<sup>9</sup>Wawancara dilakukan dengan Herman Sofyan selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bukittinggi, yang bertempat di Kantor DPRD Kota Bukittinggi, pada tanggal 7 Juli 2020, pada pukul 17.00WIB.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Herman Sofyan memberikan keterangan bahwa selama kebijakan yang diajukan tidak melanggar undang-undang dan tidak menyalahi aturan tidak ada alasan bagi DPRD untuk menolak kebijakan tersebut. Kalaupun ada pengajuan kebijakan yang dianggap kurang tepat maka akan dilakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan tersebut.

“Yang saya dengar dari beberapa pimpinan bahwasanya dari segi independen itu tidak menjadi penghalang malah sebenarnya membantu. Jadi dalam tanda kutip, kalau independen itu hanya berhutangnyanya ke rakyat beda dengan partai. Kalau kita umpamanya masuk partai otomatis kan kepartai harus apa ke rakyat juga harus apa. Jadi rasanya dari segi pemeritahan di Bukittinggi, dapat dilihat Bukittinggi pembangunannya, kemudian perubahan-perubahannya, majulah kira-kira.”<sup>10</sup>

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Rofie Hendria selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Kota Bukittinggi yang berkantor di Balai Kota Bukittinggi. Rofie Hendria menyimpulkan bahwa sebenarnya latar belakang independen ini membantu proses pemerintahan, bukan menjadi penghalang. Rofie Hendria memandang hal ini sebagai kelebihan bukan kekurangan sama sekali. Bahkan sekarang dapat dilihat bahwa banyak perubahan-perubahan baik yang sudah dapat dilihat hasilnya di Kota Bukittinggi selama pemerintahan Ramlan Nurmatias. Peneliti menyimpulkan berdasarkan keterangan dari narasumber bahwa, latar belakang independen ini tidak menghambat proses pemerintahan dikarenakan memiliki regulasi yang jelas, serta fokus dalam pemerintahan adalah untuk kepentingan rakyat, tidak ada lagi unsur kepentingan dari partai politik. Kepala

---

<sup>10</sup>Wawancara dilakukan dengan Rofie Hendria selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Kota Bukittinggi, yang bertempat di Kantor Balai Kota Bukittinggi, pada tanggal 25 Juni 2020, pada pukul 16.00WIB.

daerah secara langsung bertanggung jawab kepada masyarakat yang sudah mempercayakan amanat. Walikota memiliki kewajiban kepada masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak terpengaruh oleh kepentingan khusus dari partai politik. Pemerintahan terlaksana antara pemerintah dengan masyarakat, dan dengan DPRD sebagai pengawasnya. Keterangan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Novi Budiman di bawah ini.

“Dalam banyak hal sesungguhnya banyak kalangan yang mengatakan bahwa latar belakang independen ini, akan menjadi faktor penghambat dalam proses menjalankan pemerintahan. Namun bagi saya itu tidak menjadi persoalan ketika regulasi kita mengatur bagaimana mekanisme terhadap pemilihan calon independen ini. Dalam satu periode pertama pemerintahan walikota Bukittinggi, bagi saya ini telah membuktikan, sesungguhnya kepala daerah independen itu mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang menurut saya mencapai keberhasilan. Secara umum saya tidak menemukan adanya hambatan dalam proses tersebut. Tergantung kepiawaian, ini merupakan kepiawaian kepala daerah independen Ramlan Nurmatias dalam membangun komunikasi politik dengan legislatif.”<sup>11</sup>

Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai komunikasi politik walikota dengan wakil walikota, pertanyaan ini peneliti ajukan atas dasar latar belakang independen sebelumnya. Peneliti beranggapan walikota dan wakil independen memiliki komunikasi yang lebih erat dibanding dengan walikota dan wakil walikota yang berasal dari jalur partai politik.

“Walikota dan wakil walikota itu sesuai dengan undang-undang, bahwa tugas masing-masing itu sudah ada, kebijakan tetap di walikota. Komunikasi nya baik bagus lancar, tidak ada masalah. Kita mau rapat-rapat sama, mau kemana

---

<sup>11</sup>Wawancara dilakukan dengan Novi Budiman selaku Dosen Komunikasi Politik IAIN Batusangkar, yang bertempat di kediaman narasumber, pada tanggal 27 Agustus 2020, pada pukul 09.20 WIB.

sama. Ya artinya dari visi misi kita itu penjabarannya kan sudah jelas, apa yang harus kita kerjakan.”<sup>12</sup>

Ramlan Nurmatias mengatakan bahwa komunikasi politik dengan Irwandi selaku wakil walikota berjalan dengan lancar sesuai dengan tugas masing-masing. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama-sama, keputusan kebijakan didiskusikan bersama dan penetapannya tetap berada di walikota.

“Sejauh ini tidak ada masalah, apalagi karena beliau itu independen. Kalau dari partai sudah ada masalah ini, yang satu partai A yang satu partai B ini kan sering kali ada masalah. Yang sekarang ini aman-aman saja.”<sup>13</sup>

Sekretaris Daerah, Yuen Karnova berpendapat bahwa dengan latar belakang independen ini justru menghasilkan komunikasi politik yang lebih baik antara walikota dengan wakil walikota, dikarenakan tidak adanya kepentingan partai politik yang berbeda antara keduanya sehingga visi dan misi pasangan ini dapat berjalan tanpa adanya unsur kepentingan partai. Kepentingan partai antara walikota dan wakil walikota pada umumnya menjadi pemicu perselisihan antara partai pengusung masing-masing. Hal ini berdasarkan pada koalisi yang terjadi diantara partai politik dalam pengajuan walikota maupun wakil walikota. Ini merupakan salah satu temuan baru bahwa latar belakang independen justru memperkecil perselisihan antara walikota dengan wakil walikota dikarenakan tidak adanya perbedaan kepentingan dari partai pengusung masing-masing. Walikota dan Wakil Walikota menjadi satu kesatuan yang bekerjasama melaksanakan tugas berdasarkan visi dan misi untuk kepentingan bersama tanpa adanya upaya mengutamakan kepentingan partai politik

---

<sup>12</sup>Walikota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>13</sup>, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

dari kedua pihak misalnya, jika Walikota dan Wakil Walikota diusung oleh partai politik.

“Sejauh ini yang saya lihat itu walikota dengan wakil walikota komunikasinya lancar. Jadi bisa kita lihat sebagaimana dalam pengambilan keputusan selalu bersama. Tetap mengutamakan janji-janji kepada rakyat, apa yang sudah terjanjikan dalam visi misi kampanye, itu yang saya lihat dari beliau berdua ini. Sampai saat ini saya lihat tidak ada masalah komunikasi atau apa antara keduanya. Belum pernah.”<sup>14</sup>

“Dalam kerja bersama sudah cukup baik dalam kontestasi kekuasaan. Ramlan Nurmatias dan Irwandi sudah membuktikan bahwa independen itu bisa bertarung. Dari sisi keberhasilan antara Ramlan Nurmatias dengan Irwandi sudah berjalan dengan sukses dan baik.”<sup>15</sup>

Berdasarkan pengamatan informan triangulasi, Novi Budiman kepala daerah independen membuktikan bahwa mereka mampu bertarung dan mencapai keberhasilan yang cukup baik. Didukung oleh pernyataan Rofie Hendria bahwa pada dasarnya komunikasi politik antar walikota dengan wakil walikota terjalin dengan baik. Kerjasama antara keduanya berdasar pada keputusan bersama.

### **C. Proses Komunikasi Politik Walikota Independen dengan DPRD**

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, Dedi Fatria selaku Anggota Komisi I DPRD Kota Bukittinggi bidang Perekonomian, Keuangan, dan Kesejahteraan Rakyat. Nofrizal Usra selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Bukittinggi yang memimpin bidang Perekonomian, Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat. Serta Jhon Edwar selaku Ketua Komisi III yang memimpin bidang Pembangunan. Berikut

---

<sup>14</sup> Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>15</sup>Dosen Komunikasi Politik IAIN Batusangkar. Op.Cit.,

pertanyaan yang peneliti ajukan “Bagaimana bentuk komunikasi politik antara anggota DPRD dengan Walikota independen?” yang dijawab demikian oleh informan :

“Tidak ada perbedaan mendasar komunikasi politik antara walikota independen dengan walikota dari partai politik. Karena semua mekanisme sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, DPRD dan walikota harus mentaati semua ketentuan, baik dalam penyusunan APBD atau Pembuatan Perda dan kegiatan lainnya.”<sup>16</sup>

“Secara politisnya tentu ada rapat kemudian kegiatan-kegiatan resmi atau lobi-lobi yang dilaksanakan oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah. Komunikasi kita itu ada yang lisan ada yang tulisan bentuknya. Lisan misalnya pembicaraan di acara-acara daerah alek nagari, pacu kuda, pentas seni dan lain-lain itu salah satu sarana menyampaikan komunikasi politik dalam bentuk lobi ringan.”<sup>17</sup>

“Komunikasi politik antara DPRD dengan Walikota yang berasal dari independen selagi kepala daerahnya itu berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kepentingan masyarakat banyak, sesuai visi dan misinya tentu DPRD akan memberi semacam dukungan juga terhadap kebijakan kepala daerah. Kecuali bertentangan dengan aturan yang berlaku dan tidak mengedepankan kepentingan masyarakat. Kami dari DPRD akan melakukan semacam hak yang ada di DPRD.”<sup>18</sup>

Menurut Cangara komunikasi politik adalah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.<sup>19</sup> Komunikasi tersebut bersifat politik, berakibat politik serta berpengaruh terhadap perilaku politik. Komunikasi

---

<sup>16</sup> Wawancara dilakukan dengan Dedi Fatria selaku Anggota Komisi I DPRD Kota Bukittinggi, yang bertempat di Kantor DPRD Kota Bukittinggi, pada tanggal 1 Februari 2021, pada pukul 15.00WIB.

<sup>17</sup> Wawancara dilakukan dengan Nofrizal Usra selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Bukittinggi, yang bertempat di Kantor DPRD Kota Bukittinggi, pada tanggal 2 Februari 2021, pada pukul 13.00WIB.

<sup>18</sup> Wawancara dilakukan dengan John Edwar selaku Ketua Komisi III DPRD Kota Bukittinggi, yang bertempat di MDA Parit Antang Kota Bukittinggi, pada tanggal 11 Februari 2021, pada pukul 10.00WIB.

<sup>19</sup> Hafied Cangara.2016. *Komunikasi Politik Konsep, teori dan Strategi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

politik walikota independen tidak sesulit yang dibayangkan selama ini. Aturan perundang-undangan sudah mengatur hal tersebut, DPRD Kota Bukittinggi tidak mempermasalahkan latar belakang independen melainkan bersikap profesional sesuai dengan fungsi masing-masing. Hubungan DPRD dengan walikota tidak selamanya tertumpu pada partai politik.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali “Apa sajakah topik pembahasan yang sering dibicarakan dalam komunikasi politik antara anggota DPRD dengan walikota independen?”, mendapat jawaban sebagai berikut :

“Pembahasan APBD, Pembuatan Perda, Rapat dengar pendapat dan hal-hal terkait lainnya.”<sup>20</sup>

“Sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD sendiri yaitu mengawasi anggaran dan membuat aturan, jadi ini yang kita laksanakan bersama dengan walikota. Peraturan daerah, kebijakan, anggaran yang dibahas tidak jauh dari itu.”<sup>21</sup>

“Pembahasan yang sering dibicarakan tentu dalam menagih janji politiknya yang tertuang dalam RPJMD yang mana walikota terpilih sesuai dengan visi dan misi yang disampaikannya itu dituangkan dalam bentuk peraturan daerah tentang RPJMD.”<sup>22</sup>

Komunikasi politik yang dilakukan tidak jauh dari pembahasan mengenai APBD, Ranperda, Kebijakan serta janji politik yang sudah disampaikan oleh walikota. Topik yang dikomunikasikan antara walikota independen dengan anggota DPRD bersifat politik dimana terdapat pembahasan mengenai APBD, Ranperda, RPJMD, visi misi serta janji politik walikota. Memiliki akibat politik yakni

---

<sup>20</sup> Anggota Komisi I DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>21</sup> Ketua Komisi II DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>22</sup> Ketua Komisi III DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

persetujuan terhadap APBD, Ranperda dan kebijakan-kebijakan terkait, akibat politik ini juga dapat berupa pembahasan lebih lanjut serta tindakan-tindakan yang dilakukan setelah melaksanakan rapat resmi ataupun lobi politik. Komunikasi ini juga berpengaruh pada perilaku politik, baik dari sisi walikota maupun dari sisi anggota DPRD. Walikota berperilaku lebih cenderung mendengarkan dan DPRD berperilaku cenderung mendominasi dalam komunikasi yang dilaksanakan diantara kedua pihak.

Pertanyaan berikutnya “Kapan komunikasi politik antara DPRD dengan walikota independen dilaksanakan?” dengan jawaban sebagai berikut :

“Disaat dilakukan rapat pembahasan APBD, pembahasan Ranperda, rapat dengar pendapat, sidang-sidang paripurna. Bisa juga kadang-kadang diluar rapat dalam suasana makan siang.”<sup>23</sup>

“Yang pertama tentu dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja, kemudian dihak anggaran anggota dewan dilaksanakan dalam pembahasan APBD. Dalam kegiatan perda dilaksanakan dalam pembahasan dengan walikota atau yang mewakili. Kapannya itu tergantung situasi kebijakan yang akan diterbitkan. Pertemuannya sudah terjadwal tinggal diikuti saja sesuai dengan prosedur.”<sup>24</sup>

“Agenda rapat sudah ditentukan melalui badan musyawarah DPRD, kalau rasanya kalau rasanya perlu mengadakan komunikasi antara DPRD dengan walikota itu kami akan mengagendakan biasanya satu kali masa sidang ada pertemuan rapat untuk komunikasi.”<sup>25</sup>

Agenda rapat DPRD dengan walikota sudah ditentukan, kedua pihak hanya perlu mengikutinya saja. Rapat akan diagendakan saat dirasa perlu melakukan komunikasi untuk membahas anggaran, perda, dan lainnya. Pada saat pelaksanaan rapat komunikasi politik yang dilakukan ada pada ruang lingkup resmi. Berbeda jika

---

<sup>23</sup> Anggota Komisi I DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>24</sup> Ketua Komisi II DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>25</sup> Ketua Komisi III DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

berada diluar suasana rapat yang masuk dalam lingkup informal atau tidak resmi yang biasa disebut dengan lobi politik. Sesuai dengan Teori Lobi menurut Cutlip, Center, dan Broom, dimana lobi merupakan bagian khusus dari *public relations* untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah terutama untuk mempengaruhi legislasi dan regulasi.<sup>26</sup> Pembicaraan pada saat makan siang merupakan salah satu bentuk lobi politik dimana pembicaraan tersebut ditujukan untuk mempengaruhi legislasi dan regulasi pemerintahan.

Kemudian peneliti lanjutkan dengan pertanyaan berikut “Dimana interaksi tersebut dilaksanakan?”, yang dijawab sebagai berikut : “Di Kantor DPRD Kota Bukittinggi.”<sup>27</sup>

“Menyesuaikan dengan keadaan, jika memungkinkan untuk tetap dilaksanakan dikantor ya dikantor, kalau tidak mungkin dikantor mungkin bisa ditempat-tempat lain. Tidak menutup kemungkinan adanya komunikasi lanjutan dalam bentuk lobi ringan.”<sup>28</sup>

“Tentu kita sebagai wakil rakyat yang menampung seluruh aspirasi masyarakat, kita mengundang kepala daerah untuk mengadakan rapat di kantor DPRD karena tidak mungkin DPRD berkunjung ke kantor walikota karena jumlahnya cukup banyak, dari pada kepala daerah yang hanya dua orang. Jadi walikota yang kita undang untuk rapat di kantor DPRD.”<sup>29</sup>

Rapat dilaksanakan di Kantor DPRD dengan mengundang pemerintah daerah.

Terkadang komunikasi juga berlangsung pada saat makan siang dengan lobi ringan, lobi ringan yang dimaksud ialah berupa pembahasan lanjut mengenai rapat yang

---

<sup>26</sup> Cutlip, Center, Broom. 2009. *Effective Public Relations*. Jakarta:Prenada Media Grup.

<sup>27</sup> Anggota Komisi I DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>28</sup> Ketua Komisi II DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>29</sup> Ketua Komisi III DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

sebelumnya dibahas di Kantor DPRD. Lobi bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah secara informal. Rapat resmi berisikan komunikasi yang membahas kebijakan-kebijakan politik dilaksanakan dalam suasana resmi.

Pertanyaan lanjutan “Siapa pihak yang lebih mendominasi dalam komunikasi politik antara anggota DPRD dengan walikota independen?” mendapat jawaban sebagai berikut :

“Dominasinya seimbang, akan tetapi disaat ada pembahasan yang tidak mendapatkan titik temu maka DPRD akan memanggil Walikota untuk dilakukan pendalaman pembahasan. Walikota akan memaparkan permasalahan dengan lebih detail agar dapat dipahami oleh semua anggota DPRD.”<sup>30</sup>

“Dewan mengawasi dan menentukan, yang lebih mendominasi adalah pihak DPRD. Walikota atau yang mewakili itu hanya membahas sekilas dan mengantarkan saja .Kita di dewan yang membahas.”<sup>31</sup>

“Anggota DPRD lebih mendominasi karena satu sisi DPRD adalah orang politik yang mewakili masyarakat Bukittinggi yang juga mewakili aspirasi dari partai politik. Dalam partai politik anggota DPRD mempunyai warna yang bisa kita anggap satu kesatuan.”<sup>32</sup>

Komunikasi politik lebih didominasi oleh DPRD, dikarenakan DPRD yang berjumlah lebih banyak tentunya memiliki berbagai aspirasi dari masyarakat serta aspirasi dari partai politik masing-masing. Walikota independen sanggup untuk mengimbangi hal tersebut, hal ini terbukti dengan tidak adanya kendala yang terjadi selama pemerintahan walikota independen. Kendala ini dapat diatasi dengan pembicaraan yang memiliki unsur politik, dimana komunikasi ini bertujuan untuk

---

<sup>30</sup> Anggota Komisi I DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>31</sup> Ketua Komisi II DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>32</sup> Ketua Komisi III DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

menghasilkan akibat politik, serta kegiatan ini mempengaruhi perilaku politik dari masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi politik tersebut.

Pertanyaan berikutnya “Adakah perda atau kebijakan yang terhambat prosesnya hingga saat ini? Apa penyebabnya?” mendapat jawaban sebagai berikut:

“Sampai saat ini tidak ada perda yang diusulkan yang terhambat prosesnya. Independen atau tidak sama saja, karena hakikatnya pemerintah daerah itu pola kerjanya sudah diatur dengan banyak ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian DPRD dengan Walikota hanya tinggal menjalani ketentuan tersebut. Mungkin sedikit lebih berat dari sisi walikota independen dikarenakan harus lebih ekstra dalam menjelaskan rancangan perda kepada anggota DPRD dikarenakan tidak memiliki keterwakilan partai di parlemen.”<sup>33</sup>

“Jelas itu pasti ada yang terhambat, karena dalam menyusun perda itu tentu dibutuhkan banyak referensi dari masyarakat kemudian daerah-daerah lain yang telah melaksanakan aturan-aturan tersebut. Ada juga yang terkendala dengan adat istiadat dan aturan-aturan di daerah kita atau aturan yang lebih tinggi. Penyebab terhambatnya ini bukan dikarenakan walikota independen tapi karena memang kebijakan ini masih membutuhkan referensi sebelum disahkan. Alhamdulillah kalau mengenai walikota independen itu sampai saat ini baik-baik saja tidak ada masalah.”<sup>34</sup>

“Untuk Kota Bukittinggi sampai sekarang ini belum ada perda yang tidak terealisasi atau tidak selesai pembahasannya dari ranperda menjadi perda. Mungkin ada keterlambatan, keterlambatan itu semacam perda ini yang perlu dilakukan pengujian di tengah masyarakat karena menyangkut pada tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Mungkin kendalanya disana, tapi untuk yang terhambat sepenuhnya belum ada perda Bukittinggi.”<sup>35</sup>

Sampai saat ini perda yang terhambat dikarenakan walikota independen tidak ada, komunikasi politik antara walikota dengan DPRD berjalan dengan lancar baik dalam rapat resmi maupun dalam lobi politik. Keterlambatan dan penundaan perda disebabkan oleh faktor lain diluar faktor kepala daerah independen. Ini merupakan

---

<sup>33</sup> Anggota Komisi I DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>34</sup> Ketua Komisi II DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>35</sup> Ketua Komisi III DPRD Kota Bukittinggi Op.Cit.,

hal yang luar biasa, ketiga narasumber triangulasi menjawab dengan yakin bahwa tidak ada ranperda yang terhambat prosesnya dikarenakan latar belakang independen. Jawaban tersebut membuktikan Ramlan Nurmatias merupakan salah satu contoh keberhasilan pemerintahan independen. Komunikasi politik antara kedua lembaga terjalin dengan baik tanpa melibatkan bantuan dari partai politik. Penggunaan komunikasi politik untuk memperlancar proses pemerintahan berjalan dengan baik.

Peneliti mengajukan pertanyaan “Saat kebijakan berasal dari walikota, dengan cara apa pihak tersebut meyakinkan DPRD?” yang mendapat jawaban sebagai berikut :

“Dalam rapat kita saling berkomunikasi yang menghasilkan suatu kesepakatan yang tertuang dalam semacam risalah. Artinya risalah itu adalah hasil rapat kerja antara DPRD dengan walikota.”<sup>36</sup>

Walikota independen meyakinkan DPRD dengan menggunakan komunikasi politik untuk mencapai kesepakatan. Dari pihak walikota independen melakukan komunikasi politik lebih ekstra karena di DPRD tidak ada anggota partai yang akan menjelaskan ranperda yang diajukan oleh walikota independen. Hal tersebut menghasilkan kesepakatan antara walikota dengan anggota DPRD, dikarenakan walikota memberikan kesempatan bagi DPRD untuk lebih mendominasi materi pembahsan rapat.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara bersama informan, komunikasi politik yang terjalin antara anggota DPRD dengan walikota independen

---

<sup>36</sup> Ketua Komisi III DPRD Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

terlaksana dalam bentuk rapat resmi dan lobi politik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dibicarakan dalam rapat resmi dan lobi politik ini tidak jauh dari pembahasan mengenai peraturan daerah, kebijakan dan anggaran. Rapat resmi biasanya dilaksanakan secara terjadwal berbeda dengan lobi yang dapat dilakukan diluar jadwal rapat atau pun berlokasi diluar kantor. Lobi politik yang dilakukan hanya sekedar pembicaraan ringan mengenai ranperda, anggaran, dan lain-lain. Pihak yang lebih mendominasi adalah anggota DPRD dikarenakan DPRD lah yang akan mengawasi dan membahas gagasan dari peraturan daerah tersebut. Ramlan Nurmatias mampu mengimbangi hal tersebut yang dibuktikan dengan tidak adanya masalah yang terjadi antara walikota independen dengan DPRD selama periode pemerintahan. Peraturan daerah atau kebijakan yang terhambat tentunya ada, tetapi terhambatnya peraturan tersebut bukan disebabkan karena walikota independen, melainkan masih dibutuhkannya referensi mengenai peraturan tersebut agar tepat sasaran dan sesuai dengan adat istiadat yang dijalankan di Kota Bukittinggi. Dengan demikian peneliti menemukan sebuah temuan baru, yang menafsirkan bahwa partai politik tidak dapat menghambat maupun mempengaruhi proses pemerintahan kepala daerah independen, selagi kebijakan dan ketentuan tidak menyalahi undang-undang. Fungsi pengawasan dari DPRD tidak dapat menghalangi kepala daerah independen jika tidak didasari oleh dasar hukum dan alasan yang jelas.

Komunikasi politik dengan pihak mana saja yang berjalan dengan lancar, merupakan pertanyaan peneliti berikutnya. Peneliti berasumsi bahwa komunikasi

akan terjalin lebih lancar dengan tim sukses pasangan independen pada masa kampanye dan kelompok-kelompok pendukungnya.

“Semua. Jadi kalau sudah menjadi walikota kitakan milik rakyat lagi, semua kepentingan masyarakat kan harus kita perhatikan. Tidak ada lagi kepentingan kelompok ini, kelompok ini, jadi bukan itu. Pemerintah itu jelas dia memikirkan kepentingan daerah dan kepentingan rakyatnya. Apa-apa kepentingan kita salurkan melalui pendidikan, melalui ekonomi, semua tidak boleh ada perbedaan lagi. Jadi cara berfikir kepala daerah harus cara berfikir untuk semua orang.”<sup>37</sup>

Pernyataan dari Ramlan Nurmatias didukung oleh Irwandi, dengan jawaban sebagai berikut :

“Sebenarnya komunikasi politik itu dengan segala pihak kita lakukan tapi secara formal, namanya independen dalam pengusungan itu kita tidak melalui jalur partai politik. Tapi dengan partai politik pun kita tetap membangun komunikasi.”<sup>38</sup>

Pertanyaan serupa juga peneliti ajukan pada Yuen Karnova, sebagai Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.

“Semuanya, jadi artinya komunikasi politik tidak ditentukan oleh independen atau tidak. Tapi ditentukan oleh kepemimpinan yang bersangkutan.”<sup>39</sup>

Berikut pernyataan dari Rofie Hendria, Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Kota Bukittinggi.

“Pimpinan kami yang kami lihat dalam mengambil keputusan itu selalu mengutamakan musyawarah. Ketika pedagang pasar atas waktu kebakaran dimana itu ibaratnya pengambilan keputusan, yang kami tahu kami mengumpulkan pedagang. Kemudian inikan pasar atas sudah selesai itukan mau penempatan masuk kembali. Pimpinan maksudnya Pak Walikota sendiri

---

<sup>37</sup> Walikota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>38</sup> Wakil Walikota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>39</sup> Wawancara Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

sudah berencana bertemu dulu. Kita bisa melihat bahwasanya musyawarah, jadi rasanya untuk komunikasi dengan pihak-pihak baik dari legislatif (dewan) kami terus melakukan komunikasi. Ibaratnya fungsi dewan itu kan pengawas pemerintah jadi otomatis terus komunikasi. Bagaimana yang kami lakukan ini, apakah boleh atau tidak. Dan selama ini masih lancar-lancar saja.”<sup>40</sup>

Tanggapan yang disampaikan oleh Novi Budiman terkait pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang peneliti ajukan pada narasumber sebelumnya.

“Semua lapisan masyarakat, semua komunitas mampu dibangun oleh Irwadi ini, dari segi komunikasi LSM, komunitas adat, komunitas keagamaan, pendidikan, semua komunitas. Beberapa prestasi-prestasi prestisius dapat dilacak di jejak digital, berupa pencapaian-pencapaian dalam sektor lingkungan, sektor pendidikan, dan sektor pembangunan pariwisata.”<sup>41</sup>

Berdasarkan keterangan dari narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan latar belakang independen, kepala daerah menjadi milik masyarakat secara keseluruhan tanpa membedakan kelompok dan golongan. Komunikasi politik terjalin dengan semua pihak tanpa terkecuali, tim sukses bukanlah kelompok yang diutamakan tetapi masuk dalam lingkup masyarakat yang menjadi fokus utama pemerintah. Komunikasi dengan semua kalangan tersebut menghasilkan akibat politik baik bagi masyarakat.

#### **D. Kendala Walikota Independen dengan DPRD**

Peneliti melanjutkan wawancara, berdasarkan pengamatan peneliti belum pernah terdengar kasus serius mengenai perselisihan antara pemerintah dengan DPRD

---

<sup>40</sup>Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>41</sup>Dosen Komunikasi Politik IAIN Batusangkar. Op.Cit.,

dalam proses pemerintahan. Sejauh ini apakah ada permasalahan serius yang terjadi, dalam perancangan APBD misalnya? Berikut jawaban dari narasumber :

“Berbeda pendapat biasa saja. Artinya DPRD membahas dengan pemerintah kan ada perbedaan pendapat. Tapi pemerintah menjelaskan, perselisihan-perselisihan yang akan merugikan rakyat rasanya tidak ada.”<sup>42</sup>

“Kita dalam menjalankan pemerintahan itu harus transparan, jadi dengan transparansi yang kita lakukan, semua pihak akan tahu kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Yang jelas dengan visi misi yang kita bangun didalam RPJM itu, kita menyusun RPJM melihat kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jadi kita tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Sehingga, alhamdulillah tidak pernah ada kendala yang berarti walaupun namanya dipemerintahan itu mulus sama sekali tidak juga. Secara prinsip sampai hari ini alhamdulillah semua lancar-lancar saja.”<sup>43</sup>

Berdasarkan jawaban dari Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi mengenai kendala dengan DPRD, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala yang terjadi hanya sebatas perdebatan yang wajar, kendala yang mengakibatkan terganggunya proses pemerintahan yang dapat merugikan masyarakat sampai saat ini tidak ada. Ketidaktepatan yang terjadi masih dalam batas wajar yang bisa dilakukan peninjauan kembali melalui kegiatan komunikasi politik maupun lobi politik untuk mempengaruhi legislasi dan regulasi yang akan diresmikan.

“Komunikasi yang dibangun untuk memperoleh dukungan, masuk dalam setiap kekuatan-kekuatan parlemen yang ada di Kota Bukittinggi, sehingga beliau menawarkan konsep-konsep yang rasional terhadap pengembangan Kota Bukittinggi. Ketika beliau mampu meyakinkan DPRD bahwasanya program yang beliau laksanakan itu, tidak ada celah bagi DPRD untuk tidak mendukung program tersebut. Ini termasuk lobi politik, komunikasi mengenai

---

<sup>42</sup>Wawancara dilakukan dengan Ramlan Nurmatias selaku Walikota Bukittinggi, yang bertempat di Kantor Balai Kota Bukittinggi, pada tanggal 25 Juni 2020, pada pukul 14.00WIB.

<sup>43</sup>Wawancara dilakukan dengan Irwandi selaku Wakil Walikota Bukittinggi, yang bertempat di Kantor Balai Kota Bukittinggi, pada tanggal 25 Juni 2020, pada pukul 15.00WIB.

bagaimana kita membangun lobi ini. Jadi pemerintah jika melakukan negosiasi kemudian lobi, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang harus dibangun dalam kepiawaian membangun lobi dan negosiasi itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.”<sup>44</sup>

Berdasarkan keterangan dari narasumber dapat disimpulkan bahwa latar belakang independen ini tidak menghambat proses pemerintahan jika, kepala daerah tersebut mampu dan memiliki sistem yang baik agar tidak terjadi kendala serius yang dapat menghambat dan mengganggu kepentingan masyarakat. Komunikasi politik dalam bentuk lobi merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Komunikasi politik memiliki peran penting dalam proses mediasi antara walikota dengan DPRD.

Ramlan Nurmatias menjabat sebagai ketua Pordasi Sumatera Barat, berdasarkan pengamatan peneliti secara langsung. Dalam berbagai acara pacu kuda yang diselenggarakan di wilayah Sumatera Barat terjadi interaksi antara kepala daerah dengan DPRD, serta interaksi dengan pejabat lainnya. Peneliti berasumsi bahwa acara ini termasuk salah satu kegiatan yang memperlancar komunikasi politik. Baik antara kepala daerah dengan kepala daerah lainnya, antara kepala daerah dengan DPRD maupun kepala daerah dengan pejabat lainnya. Maka dari itu peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ramlan Nurmatias sebagai berikut ; Prestasi di bidang non-pemerintahan menjabat sebagai Ketua umum Pordasi Sumatera Barat.

---

<sup>44</sup>Dosen Komunikasi Politik IAIN Batusangkar. Op.Cit.,

Dalam acara ini terjadi interaksi antara dengan DPRD, apakah hal tersebut termasuk faktor penunjang komunikasi politik?

“Pordasi itu kan organisasi, kelompok terhadap orang berkuda. Dan pemerintah ini kan semua kegiatan yang menyangkut olahraga kan pemerintah wajib membina. Kebetulan Bapak dipercaya untuk ketua pordasi yang artinya tidak ada masalah. Ini organisasi, ini urusan pemerintah, yang ini urusan DPRD. Dengan adanya acara ini tentunya lebih menjalin keakraban dengan berbagai pihak.”<sup>45</sup>

Peneliti beranggapan bahwa prestasi di bidang non-pemerintahan tersebut termasuk faktor pendukung kelancaran komunikasi politik. Acara tersebut memberikan kesempatan bagi kepala daerah, anggota DPRD dan pejabat lainnya untuk berinteraksi lebih dekat. Salah satu bukti lobi pada saat acara tersebut ialah komunikasi antara Walikota Ramlan Nurmatias dengan Anggota DPRD Deddy Moeis yang berbunyi demikian :

“Tolong lah itu ciek RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) banyak nan ka dibangun lai. Bia capek lo salasainyo, kajaan itu dulu. Bisa langsung dikarajoan, banyak nan ka dibenahi.”

(Tolong lah itu satu RPJPD banyak yang akan dibangun lagi. Agar cepat selesainya, kejarkan ini dulu. Bisa langsung dikerjakan, banyak yang mau dibenahi).<sup>46</sup>

Setelah peneliti dalam pembangunan jangka panjang tersebut terbit di website database peraturan BPK RI dalam bentuk Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019, perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. Perda ini ditetapkan pada

---

<sup>45</sup> Walikota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>46</sup> Dialog informal antara Walikota dengan salah satu anggota DPRD yang peneliti dengar langsung pada saat acara “Pacu Kuda” pada tanggal 1 April 2018.

tanggal 4 April 2019. Yang mana data tersebut bersumber dari Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, bertemakan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja. Peraturan daerah ini berisikan rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan, keadaan akhir pada periode perencanaan, perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah.<sup>47</sup>

Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai keunggulan yang dirasakan Ramlan Nurmatias dari latar belakang independen tersebut, apakah tidak ada tekanan dari partai politik?

“Kita ini sebenarnya mau maju dengan partai, mau maju dengan independen itukan persyaratan administrasi. Kalau dengan independen kan artinya Bapak tidak punya hutang dengan partai politik, tapi berhutang ke masyarakat. Hutang ke masyarakat apa artinya. Nanti kita bayar dengan program, ya dengan partai politik pun sebenarnya sama. Cuma Bapak lebih suka lebih senang dengan independen karena semua partai politik itu teman-teman kita, jadi tidak ada kubu-kubuan. Karena undang-undang membolehkan, makanya Bapak maju dengan independen.”<sup>48</sup>

Berikut pernyataan dari Wakil Walikota Bukittinggi.

“Dari segi kepemimpinan. Kepemimpinan beliau itu sangat mampuni lah, sehingga yang kita rasakan saat ini beliau itu sebagai seorang pemimpin yang berhasil. Saya kira masyarakat juga menilai berhasil. Kemudian sekali lagi tergantung pada orangnya, bagaimana pribadinya. Bukan dengan partai apa dia maju. Kita masih ingat juga dulu banyak sekali pemimpin-pemimpin kita yang maju, sebetulnya mereka bukan orang partai hanya diusung oleh partai. Sukses juga, jadi tidak harus ditentukan oleh itu.”<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> JDIH BPK RI. Database Peraturan. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

Keterangan tambahan yang disampaikan oleh Rofie Hendria.

“Keunggulannya itu yang kami lihat sebagai bawahan, beliau itu bekerjanya untuk rakyat jadi, beliau tidak mau ternoda oleh partai politik. Dimasa sekarang ini partai politik itu terlalu banyak mengatur.”<sup>50</sup>

Berikut pengamatan politik dari sudut pandang Novi Budiman.

“Kita kembali kepada, kenapa calon independen ini diatur dalam undang-undang. Jadi keunggulannya dia langsung mendapat dukungan *real* dari masyarakat, dengan pengumpulan dukungan KTP dari 10% DPT, basis pendukungnya sudah jelas. Bahkan kalau tidak salah pencalonan pertama itu sekitar 73.000 KTP mampu didapatkan dengan cap tanda basah. Ini membuktikan bahwa ada dukungan penuh yang diperoleh oleh Ramlan Nurmatias. Kalau dalam partai politik kan belum bisa kita mengukur sejauh mana, kita hanya bisa memetakan mendapat suara sekian, mendapat kursi sekian. Berbeda dengan independen yang langsung bersentuhan dengan DPT, keuntungan dari latar belakang independen langsung mendapat dukungan basis *real* dari masyarakat. Kalau partai politik kita kan masih menebak-nebak dan mengawang-ngawang, karena proses penentuannya berdasarkan pada perolehan kursi di DPRD.”<sup>51</sup>

Berdasarkan pernyataan beberapa narasumber di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa latar belakang independen Ramlan Nurmatias dianggap sebagai kelebihan oleh mayoritas pihak. Dan dari sisi partai politik yang berada diparlemen, memilih untuk tidak mengomentari latar belakang independen tersebut karena dianggap sebagai topik yang sensitif dari sisi partai politik.

Peneliti ingin menanyakan secara langsung kepada narasumber, menurut pengamatan peneliti ini merupakan salah satu contoh kepala daerah independen yang

---

<sup>50</sup> Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>51</sup> Dosen Komunikasi Politik IAIN Batusangkar. Op.Cit.,

sukses. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Walikota Bukittinggi dan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi :

“Dapat Ana amati sendiri. Artinya semua sama, maju dengan partai politik juga sama. Artinya DPRD itu akan menyetujui anggaran-anggaran yang tentu jelas untuk apa, untuk pendidikan, untuk ini, untuk ini. Tidak ada dia hambat, tidak ada pula dia alasan untuk menghambat itu.”<sup>52</sup>

“Mungkin terbilang contoh yang sukses. Artinya yang menentukan itu, bukan dengan apa dia maju, jadi walaupun independen, tidak ada dukungan partai. Tidak ada satu pun partai juga yang menjegal kebijakan walikota. Jadi tidak masalah, berarti komunikasi politik tidak ditentukan oleh independen atau tidaknya.”<sup>53</sup>

Herman Sofyan memilih untuk tidak mengomentari mengenai kinerja dan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan kepala daerah independen. “Itu tergantung penilaian masyarakat.”<sup>54</sup>

Rofie Hendria dan Novi Budiman memiliki pandangan yang sejalan mengenai kinerja kepala daerah independen. Yang dijawab dengan pernyataan sebagai berikut :

“Termasuk kategori sukses.”<sup>55</sup>

“Ini adalah sebuah pencapaian yang bergengsi, kita mendukung pemerintahan independen ini karena ada regulasi yang mengatur itu. Bahwa ternyata orang-orang yang berharap banyak terhadap partai politik, dibuktikan ternyata kepala daerah independen mampu melaksanakan visi dan misi yang diembannya.”<sup>56</sup>

Dari keterangan narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa Walikota Ramlan Nurmatias merupakan salah satu contoh kepemimpinan independen yang

---

<sup>52</sup> Walikota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>53</sup> Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

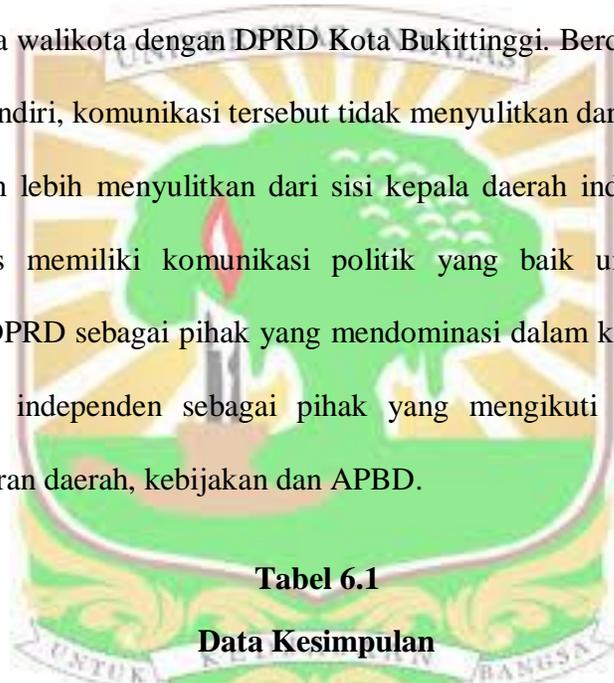
<sup>54</sup> Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>55</sup> Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Kota Bukittinggi. Op.Cit.,

<sup>56</sup> Dosen Komunikasi Politik IAIN Batusangkar. Op.Cit.,

sukses. Kesuksesan ini didasari oleh komunikasi politik yang baik untuk menunjang kelancaran komunikasi antara walikota independen dengan DPRD, Implikasi atau akibat dan keterkaitan dari penelitian ini diantaranya, fenomena politik ini berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang semakin menurun, pencalonan kandidat melalui jalur independen semakin banyak diminati oleh calon-calon potensial, kepala daerah yang memiliki latar belakang independen lebih mengutamakan kepentingan masyarakat bukan kepentingan partai politik, komunikasi politik merupakan solusi yang mendukung kelancaran proses pemerintahan, aktor politik yang menggunakan jalur independen tentunya memiliki keunggulan tersendiri dimata masyarakat. Pemerintah daerah dan DPRD saling mengawasi kinerja satu sama lain dengan lebih ketat yang berdampak positif pada perkembangan dan kemajuan daerah. Hasil penelitian yang dapat peneliti simpulkan bahwa fakta dilapangan sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh narasumber. Hingga saat ini proses pemerintahan berjalan dengan lancar dan tidak ada konflik serius antara DPRD dengan kepala daerah yang dapat mengakibatkan terganggunya proses pemerintahan. Adapun kendala dan konflik yang terjadi merupakan perbedaan pendapat yang wajar terjadi, tidak hanya terjadi pada kepala daerah independen saja. Sejauh ini kendala dalam proses pembuatan peraturan daerah dan kebijakan antara DPRD dengan kepala daerah tidak ada yang sampai mengganggu stabilitas politik Kota Bukittinggi. Dengan kata lain, bukan tidak ada kendala, kendala tetap ada seperti peraturan daerah dan kebijakan yang masih di pending misalnya, ini terjadi hampir di seluruh daerah otonom di Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa

peraturan daerah dan kebijakan yang terpending itu merupakan hal yang wajar. Yang menjadi fokus pada penelitian ini bukanlah membahas mengenai peraturan daerah atau kebijakan yang terpending melainkan, komunikasi politik antara walikota independen dengan DPRD di Kota Bukittinggi. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik berjalan dengan baik dan lancar berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan pengamatan masyarakat sekitar yang tidak pernah mendengar adanya kasus serius antara walikota dengan DPRD Kota Bukittinggi. Berdasarkan pandangan anggota DPRD sendiri, komunikasi tersebut tidak menyulitkan dari sisi pihak anggota DPRD, melainkan lebih menyulitkan dari sisi kepala daerah independen. Walikota independen harus memiliki komunikasi politik yang baik untuk mengimbangi anggota DPRD, DPRD sebagai pihak yang mendominasi dalam komunikasi tersebut, dengan Walikota independen sebagai pihak yang mengikuti alur dalam proses pembuatan peraturan daerah, kebijakan dan APBD.



**Tabel 6.1**  
**Data Kesimpulan**

Sub BAB	Formal atau Informal	Isu Politik
Bentuk Komunikasi Politik Ramlan Nurmatias	Formal : Rapat Resmi  Informal : Lobi Politik	Rapat mengenai APBD, Ranperda, dan kebijakan lainnya.  Peraturan daerah no 3 Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun

		2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi.
Proses Komunikasi Politik Walikota Independen dengan DPRD	<p>Formal : Penjadwalan rapat secara resmi yang disusun oleh sekretaris DPRD, kemudian Walikota diundang untuk menghadiri rapat resmi yang berlokasi di gedung DPRD, dalam proses rapat resmi komunikasi politik didominasi oleh anggota DPRD dengan walikota yang lebih sering mendengarkan dan mengalah.</p> <p>Informal : Komunikasi politik yang dilakukan tanpa jadwal, dengan kata lain dalam suasana informal seperti acara pacu kuda, makan siang, pentas seni, dll.</p>	<p>Pembahasan mengenai perda pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi yang dilaksanakan di gedung DPRD Kota Bukittinggi.</p> <p>Pembahasan agar DPRD mempermudah pengurusan ranperda yang diajukan oleh walikota independen pada saat acara informal.</p>
Kendala Walikota Independen dengan DPRD	<p>Formal : Perbedaan pendapat yang masih wajar. Diselesaikan dengan komunikasi menyampaikan pendapat saat rapat.</p> <p>Informal : Berjalan dengan lancar dalam acara-acara informal.</p>	<p>Menyampaikan pendapat pada saat rapat resmi baik dari pihak walikota maupun DPRD.</p> <p>Melakukan komunikasi</p>

		ringan dengan anggota DPRD dala suasana informal.
--	--	---



